

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmoko Dwi dan Hutagalung J.M. (2024). Pengantar Hukum Kepailitan, Literasi Nusantara, Malang.
- Fuady M. (2005). Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Cetakan III, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap Y. (2008). Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hariyanto, E. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media. Jakarta.
- Lili R., dan I.B Wysa P. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Mertokusumo, S. (2012). Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2016). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nugroho S. A. (2018). Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group Jakarta.
- Peter M. (2024). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 16, Prenada Media Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu.

- Rahardjo S. (2021). Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyid F. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek, CV Qiara Media. Kediri.
- Ronald Saija dan Michael Nussy. (2020). Hukum Kepailitan Kreditur Dalam Pailit, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini S.R. (2022). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan II, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Subhan M.H. (2023). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cetakan VIII, Kencana, Jakarta.
- Sutantio, R., dan Oeripkartawinata, I. (2019). Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan 1, Ideas Publishing, Gorontalo.

ARTIKEL JURNAL

- Hamzani A., Widyastuti T., Khasanah N., dan Rusli M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. International Journal of Membrane Science and Technology, 10(2), 3610-3619.
<https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Hari, S. D., dan Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Journal Undiksa, 9(1), 123-134.

- Juliantini, N. N., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P. (2021). Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 101-105. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3027.101-105>
- Magvirah Dwi Wulandari, Abdul Qahar, dan Hasnan Hasbi. (2025). Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitur Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1-22.
- Mantili, R., Dewi, Trisna P. E. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-9. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Marshanda, S. C., Joula J., dan Danny S. (2025). Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan PT. *Sarana Sulut Ventura. Productivity*, 6(3), 143-148. <https://doi.org/10.35797/ejp.v6i3.61124>
- Prajatama, H. (2014). Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(1), 41-50.
- Romlah, S., Zavira, S., dan Muafa, K. (2020). Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia. *Journal La Sociale*, 1(6), 24-30.
- Tanjaya W., Heriyanti, dan Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Journal of Swara Justitia*, 9(2), 261-267. <https://doi.org/10.31933/rynrzt05>

Timothy, G.A.T. (2022). Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, Volume 10(2), 1-11.

SKRIPSI / TESIS

Hanifah, N. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ditinjau Dari Minimum Utang Terhadap Perusahaan Solven (Studi Putusan Nomor: 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Juncto 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga.Jkt.Pusat), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Natasya A., dan Sihabudin. (2025). Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Dengan Dasar Pertimbangan Yang Mengacu Pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn Niaga.Jkt.Pst). Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata / *Burgelijk Wetboek voor Indonesie*. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang / *Wetboek van Koophandel*. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn Niaga
Jkt Pst

INTERNET

Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya (2026, Februari). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya>

Guide to Bankruptcy (2026, Februari). Diakses dari <https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-bankruptcy/guide-to-bankruptcy#who-can-be-made-bankrupt>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2025, November) Hukum. Diakses dari <https://kbbi.web.id/hukum>

Kamus Hukum Online Indonesia. (2026, Februari) Diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>

Macam Upaya Hukum Perdata Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata>

Perbedaan Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa (2026, Februari). Diakses dari <https://pinterhukum.or.id/perbedaan-upaya-hukum-biasa-dan-upaya-hukum-luar-biasa/>

Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum (2026, Februari)

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>